

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Pemalang. (2023). Dipetik 2023, dari pemalangkab.bps.go.id: <https://pemalangkab.bps.go.id/subject/153/geografi.html>
- Desa Cibuyur. (2023). Dipetik Mei 2023, dari cibuyur.desa.id: <https://cibuyur.desa.id/profil-desa/>
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Humas Sekretariat Kabinet RI. (2022, Oktober 6). Dipetik Oktober 2022, dari setkab.go.id: <https://setkab.go.id/tumbuh-581-persen-kinerja-pajak-hingga-agustus-2022-capai-rp1-1718-triliun/>
- Kabupaten Pemalang. (2023). Dipetik Juli 2023, dari infopbb.pemalangkab.go.id: https://infopbb.pemalangkab.go.id/all_desa.php
- Kabupaten Pemalang. (2012). *Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pemalang*. Pemalang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Dipetik 2023, dari kbbi.web.id.
- Kementrian Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Jakarta.
- Kementrian Keuangan. (2011). *Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Jakarta Pusat: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Noor, M. Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3 Nomor 2, 135-150.
- Pali, E. R., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan

Sario Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, 983-992.

Pemerintah Pusat. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.

Pemerintah Pusat. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi*. Jakarta.

Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum* (3 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Putra, K. Y., Yumia, K. S., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. (2017). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 No. 2, 152 - 166.

Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Askara.

Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4) , 569-577.

Wesha, P. (1992). *Kinerja Organisasi*. Jakarta: Pembaharuan.